



PENGUATAN KESIAPSIAGAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA GEMPABUMI BERBASIS KOMUNITAS

Timotius Berlian Yogi Ananto, Adi Subiyanto, Yuli Subiakto, Wilopo

Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Indonesia kerap kali dilanda bencana yang disebabkan oleh alam, tidak terkecuali bencana gempabumi yang membangkitkan kapasitas sasaran dorongan dan bencana materil pahala berpokok bencana gempabumi ini. Tingginya poin sasaran dorongan dan bencana benda materi pahala bencana gempabumi berperan semboyan rendahnya kewaspadaan otoritas dan biasa bagian dalam menemui bencana tersebut. Dengan demikian, analisis ini bercita-cita kepada membicarakan kewaspadaan otoritas dan biasa bagian dalam penjabaran imbalan bencana gempabumi berpedoman komunitas. Penelitian ini menggunakan kupasan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bahwa tahap kewaspadaan otoritas dan biasa harus melantas ditingkatkan kait status sangat sedia bagian dalam menemui bencana tawang gempabumi. Dengan demikian imbalan bencana tawang gempabumi seumpama jatuhnya sasaran dorongan, bencana benda materi dan tegahan kerohanian akan bisa dikurangi tambah optimal.

Kata Kunci: Kewaspadaan, Pemerintah, Masyarakat, Pengurangan Risiko Bencana, Gempabumi.

PENDAHULUAN

Indonesia menjadikan dunia pakai leret ke-36 pakai ruang sambungan malapateka sebanyak 10,36 bersumber 172 dunia paling rawan malapateka di rat (World Risk Report, 2018). Indeks ini memperlihatkan

bahwa Indonesia menjadikan dunia yang mempunyai taraf gaham malapateka antariksa yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena tanda geografis Indonesia yang berdomisili di dialog 3 (tiga) lapisan tektonik rat, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik (Hermon,

*Correspondence Address : wilopo02@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i4.2024.1354-1358

© 2024UM-Tapsel Press

2014). Selain itu, Indonesia juga berdomisili di salur gundukan tanah gelora berlagak yang disebut pakai Cincin Api Pasifika tau Pacific Ring of Fire (Hermon, 2014).

Kondisi geografis ini bertubrukan muka seringnya malapateka gempabumi kencang kelahirannya di Indonesia. Dalam sepuluh dekade masa 10 hari terakhir (2009-2019) malapateka antariksa gempabumi sangkil kelahirannya sejumlah 216 parit pakai nilai sasaran bersih dan berpulang rat sejumlah 637 jiwa, 8.687 sasaran luka-luka, 459.855 pengungsi, 602.223 ayat aula kaum coret turut 131 kemudahan sipil yang juga menyelami kebinasaan (BNPB, 2019).

Dalam sepuluh dekade masa 10 hari ke belakang, berlebihan skandal malapateka gempabumi pakai magnitudo sketsa yang berjangkit Indonesia, sebagai gempabumi Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, gempabumi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, gempabumi di Cianjur dan Sumedang Provinsi Jawa Barat. Kejadian malapateka gempabumi tertulis semata-mata menjadikan secerch tuangan bersumber skandal gempabumi di Indonesia yang mendatangkan jumlah sasaran jiwa, kebinasaan kemudahan, dan dahiat materil. Masih masifnya imbalan bayaran malapateka gempabumi tertulis memperlihatkan masih lemahnya tadbir malapateka, dedikasi bersumber stadium pra malapateka, era andai kegawatan, maupun pascabencana di Indonesia.

Manajemen malapateka menjadikan runtun kalender yang dilakukan kepada mengangguni malapateka dan suasana kegawatan, sekaligus menerima ikhtisar pekerjaan kepada mendukung kebanyakan pakai sambungan malapateka tinggi sehingga bisa menjauhi bala malapateka atau mudik bersumber imbalan malapateka

(Kurniyanti, 2012). Sementara itu, Undang-hela nilai 24 hari 2007 kondisi Penanggulangan Bencana membeberkan bahwa pemerintahan kesimpulan malapateka adalah sejajar reka yang melingkupi penyungguhan jasa reaktualisasi yang berisiko timbulnya malapateka, kalender penangkisan malapateka, andai kegawatan dan rehabilitasi.

Kesiapsiagaan nafsi terhitung ke bagian dalam stadium pra malapateka, yaitu urusan anju kepada berbicara momen kelahirannya (atau kans akan kelahirannya) malapateka. Perencanaan terjalin bersumber sangka terhadap niat-niat bagian dalam suasana kegawatan dan persepsi pangkal benih pengaruh yang terdapat kepada membolehkan niat tertulis. Perencanaan ini bisa menyusutkan imbalan sepi bersumber malapateka.

Masyarakat menjadikan dasar dasar bagian dalam kesimpulan malapateka, sehingga kewaspadaan bagian dalam menemui malapateka sangat penting dimiliki. Selain itu, kekuatan tertinggi khususnya serupa pranata yang akan menapuk imbalan yang kulur bayaran malapateka juga harus mempunyai kewaspadaan. Dengan demikian, imbalan klise malapateka racun dikurangi turut bisa menerima fasilitas bagian dalam menyusutkan sambungan malapateka. Peningkatan kewaspadaan harus dilakukan kepada merancang kebanyakan bagian dalam menemui malapateka di setiap jagat rawan malapateka di Indonesia.

Maka bersumber itu, analisis ini akan menguraikan lebih menyimpang kondisi pembentengan kewaspadaan kekuatan tertinggi dan kebanyakan bagian dalam penjabaran sambungan malapateka gempabumi bersandar komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menakhlikkan pemeriksaan reflektif, yaitu metode beraksi dimana seseorang bisa mengilustrasikan dan mengasosiasikan suasana berlapikkan liku-liku kehidupan dan mengasosiasikan hal secara rasional (Suharna, 2012). Proses beraksi reflektif bisa diuraikan seumpama bukti yang digunakan kepada merespon, berbunga berpunca bagian dalam diri (internal), bisa menjelajahi apa yang nyana dilakukan, menangkap kejahatan dan memperbaikinya dan mengkomunikasikan khayalan memeruntukkan cap atau refleksi memeruntukkan target langsung (Suharna, 2012).

Dengan demikian, pemeriksaan ini mencerminkan kewaspadaan otoritas dan sipil bagian dalam merasai risiko gempabumi. Teknik penghimpunan fakta memeruntukkan proses kupasan dokumentasi pakai menggerakkan pemeriksaan-pemeriksaan dan fakta-fakta kepada dianalisis pakai memeruntukkan ideologi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapsiagaan mewujudkan kemungkarannya tunggal molekul penting di bagian dalam pengaruh penyelesaian bencana cakrawala. Setiap aspek seharusnya mempunyai kewaspadaan yang tinggi terhadap kerawanan kelanjutan bencana. Penanggulangan bencana di Indonesia perseorangan sedang melakoni pergeseran paaradigma mulai sejak fatalistic responsive yang mengarah dekat respon kedaruatan pahala bencana bertolak menjelang proactive preparedness, yaitu penyelesaian bencana yang dilakukan sejak pagi-pagi menjelajahi kewaspadaan menjeru stadium pembangunan sosial. Paradigma ini mendorong dominasi dan sipil secara bersama-serupa memadankan pengaruh penjabaran resiko (Anam et al, 2018). Semakin tingginya periode dominasi dan

sipil beruang terhadap minimnya kelanjutan bencana yang ditimbulkan.

Penguatan kewaspadaan juga berlaku menjelang menyurutkan ketangkasan terganggunya ihwal kerohanian sipil. Kesiapsiagaan bukan semata-mata terpusat dekat citra dan karunia dominasi dan sipil, tetapi juga pusat dekat kewaspadaan infrastruktur. Kesiapsiagaan infrastruktur sangat berhubungan tambah mitigasi struktural. Mitigasi struktural didefinisikan seumpama kontribusi penjabaran resiko yang dilakukan menjelajahi regenerasi atau deformasi raga menjelajahi operasi penanggulangan yang dirancang (Isniainiati et al, 2014).

Selain itu, regenerasi infrastruktur kantor mudik pascabencana juga menjabat orientasi penting yang harus menjabat perhatian. Hal ini bisa dilihat mulai sejak orientasi struktur, kenyamanan, fungsional, dan sangkutan sipil (Wulansari, 2017), sehingga regenerasi mudik pascabencana bisa sepaham tambah sekte build back better and safer.

Pemerintah dan sipil memegang kontribusi penting bagian dalam pembentengan kewaspadaan menyebrangi bencana gempabumi. Secara struktur, dominasi mempunyai sejumlah generasi menginjak mulai sejak dominasi pokok seumpama periode tertinggi kait dominasi kosmos desa/kelurahan seumpama periode terendah. Dalam penyelesaian bencana cakrawala di Indonesia, dominasi memegang lembaga adat seumpama ayah bunda sambut pokok bagian dalam pengelolaan penyelesaian bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di periode kosmos, ayah bunda sambut pokok bagian dalam penyelesaian bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menjabat penunggu terdepan bagian dalam penuntasan bencana yang kelahirannya di periode

kosmos seumpama salinan dan perluasan komponen mulai sejak BNPB (Anam et al, 2018).

Pemerintah menyimpan barang bawaan yang rancangan perbanyak pengelolaan solusi bencana. Dengan adanya kategorisasi skedul kontigensi, penyerasian oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dominasi daerah (wilayah dan kabupaten/kota), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) mewujudkan arsitektur kewaspadaan yang dilakukan oleh dominasi bagian dalam menyebrangi bencana. Dalam penggunaan solusi bencana, dominasi juga harus secara rutin mengamalkan harmonisasi dan persinggungan di renggangan sebelah-sebelah tercantel di bagian dalam gatra pemerintahan (Lestari et al, 2012).

Selain itu, dominasi udik dan kelurahan juga harus mempertinggi kesiapsiagaannya bagian dalam menyebrangi bencana tawang. Hal ini bisa dilakukan tambah penyusunan udik/kelurahan tangguh bencana dan dusun siaga bencana seperti suatu prakarsa praktik kebaikan asal di babak udik/kelurahan. Kampung siaga bencana menyimpan bantuan bagian dalam menyerahkan pengetahuan dan angan-angan menjelang publik, mencetak jala-jala dan bersiteguh asosiasi sosial, mengorganisasikan, menutupi kesinambungan, menumbuhkan keandalan dan asal daya. Sedangkan udik atau kelurahan tangguh bencana lebih suka sekali seperti usaha pertambahan solusi bersandar komunitas (Habibullah, 2013).

Pengurangan resultan bencana bersandar publik sangat penting dilakukan karena publik badan lah yang akan menjabat tujuan bencana tawang gempabumi dan jika publik tidak menyimpan kewaspadaan bagian dalam menyebrangi bencana terkandung akan

bertubrukan muka acara bertenggang. Indikator tonggak yang digunakan kepada mengerok babak kewaspadaan publik bisa mengarahkan muka penanda yang dikeluarkan oleh LIPI (2006), yaitu pendirian dan gerak laku, pendekatan kedaruratan, pokok disposisi, dan penghimpunan sumberdaya.

Masyarakat harus ikut serta secara bertindak kepada mempertinggi kewaspadaan bertenggang bagian dalam menyebrangi bencana. Penguatan kewaspadaan publik bisa dilakukan menyusuri pertambahan pendirian dan gerak laku terhadap bencana, pendekatan kedaruratan, pokok disposisi maupun penghimpunan asal daya.

Partisipasi publik harus dilakukan sedari pagi buta karena publik menjabat pokok tonggak bagian dalam solusi bencana. Masyarakat berlebihan mempunyai bantuan penting sekaligus seperti pelajaran dan korban pembangunan (Syafrizal, 2013). Penguatan kewaspadaan muka publik juga bisa dilakukan tambah penghampiran komisi. Misalnya saja komisi keluarga, komisi pemuda, komisi skedul keagamaan, komisi ibu-ibu, komisi tani, dan lain-lain. Hal ini dilakukan kepada meremehkan kiat pembagian fakta dan pendirian (peranjakan of knowledge). sehingga usaha penjabaran resultan bencana bisa menjabat lebih benar sasaran, konstruktif dan efisien. Selain itu, ihwal ini juga menyerahkan keuntungan kepada tata laksana bencana kepaduan di mana akan lebih mudah kepada diorganisir memperingati adanya gatra dewan di setiap komisi terkandung (Solikhah et al, 2016).

KESIMPULAN

Kesiagaan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam gempabumi. Keduanya harus berupaya meningkatkan

kesiapannya terutama terkait kesiapan infrastruktur fisik yang diikuti dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam tanggap darurat. Sementara itu, perencanaan kedaruratan, sistem peringatan dan mobilisasi sumberdaya menjadi hal yang juga harus pula diperhatikan.

REFERENSI

- Anam, K., Mutholib, A., Setiyawan, F., Andini, B, A., & Sefniwati, S. (2018). "Kesiapan Institusi Lokal Dalam Menghadapi Bencana Tsunami: Studi Kasus Kelurahan Air Manis dan Kelurahan Purus, Kota Padang." *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 6 (1).
- Habibullah. (2013). "Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana." *Informasi* 18 (2).
- Hermon, Dedi (2014). *Geografi Bencana Alam*. Jakarta: Radja Grafindo Persada Press.
- Isnainiati, Nur., Mustam, M., Subowo, A. (2014). "Kajian Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman." *Jurnal of Public Policy and Management Review* 3(3).
- Kurniayanti, Mizam Ari. (2012). "Peran Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Manajemen Bencana." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada* 1 (1).
- Lestari, P., Prabowo, A., Wibawa, A. (2012). "Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 Pada Saat Tanggap Darurat." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 10 (2).
- LIPI. (2006). *Penguatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami*. Jakarta: LIPI dan UNESCO.
- Solikhah, U.S., Suwarno., Sarjanti., E. (2016). "Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Manajemen Bencana Longsor Lahan di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas." *Geo Edukasi* 5(1).
- Suharna, Hery. (2012). "Berpikir Reflektif (Reflective Thinking) Siswa SD Berkemampuan Matematika Tinggi Dalam Pemahaman Masalah Pecahan." *Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2012*.
- Syafrizal. (2013). "Tingkat Pengetahuan, Kesiapsiagaan, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalur Evakuasi Tsunami Di Kota Padang." *Skripsi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- UNICEF. (2018). *World Risk Report 2018*. Geneva: UNICEF.
- Wulansari, M.A.D., Wihardayanto, D. (2017). "Metodologi Penilaian Kualitas Hunian Paska Bencana Sebagai Evaluasi Strategi Rekonstruksi; Analisis Faktual Dan Perseptual." *Langkau Betang* 4 (2).